

Gmail

Compose

Mail **99+**

Chat

Meet

Inbox 230

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

More

Labels +

Q NOKEN

Active

3 of 5

[jn] Submission Acknowledgement External Inbox x

ejournalumsorong@pubmedia.id to me

Mon, May 6, 9:58 PM

Jamaluddin Jamaluddin:

Thank you for submitting the manuscript, "STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA DAN PAPUA" to Jurnal **Noken**: Ilmu-Ilmu Sosial. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/authorDashboard/submission/3349>
Username: jamaluddin_jamaluddin

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

La Basri, S.Sos., M.Si

Reply Forward

Gmail

Compose

Mail 99+

Chat

Meet

Inbox 230

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

More

Labels +

Q NOKEN

Active

2 of 5

[jn] Editor Decision External Inbox x

ejournalumsorong@pubmedia.id to me, M

Wed, May 29, 1:07 PM

Jamaluddin Jamaluddin, M Najeri Al Syahrin:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal **Noken**: Ilmu-Ilmu Sosial, "STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA DAN PAPUA".

Our decision is: Revisions Required

One attachment • Scanned by Gmail

Jn Jurnal Noken. Ilmu-Ilmu Sosial
STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA DAN PAPUA

A-jn-review-assi...

Reply Reply all Forward

Gmail

Compose

99+ Mail

Chat

Meet

Inbox 230

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

More

Labels +

Q NOKEN

Active

1 of 5

[jn] Editor Decision External Inbox x

ejournalumsorong@pubmedia.id Tue, Jun 4, 12:11 PM (11 days ago)

to me, M

Jamaluddin Jamaluddin, M Najeri Al Syahrin:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal **Noken**: Ilmu-Ilmu Sosial, "STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA DAN PAPUA".

Our decision is to: Accept Submission

One attachment • Scanned by Gmail



ejournalumsorong@pubmedia.id Tue, Jun 4, 2:51 PM (11 days ago)

to me, M

Jamaluddin Jamaluddin, M Najeri Al Syahrin:

The editing of your submission, "Studi Komparasi Implementasi dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/authorDashboard/submission/3349>

3349 / Jamaluddin et al. / Studi Komparasi Implementasi dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua

Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files [Search](#)

▶	14199	TEMPLATE JURNAL NOKEN 2024 JAMALUDDIN.docx	May 6, 2024	Article Text
▶	14402	JAMALUDDIN.docx	May 21, 2024	Article Text

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Workflow **Publication**

Submission **Review** **Copyediting** **Production**

Round 1

Round 1 Status
Submission accepted.

Notifications

[jn] Editor Decision	2024-05-29 02:06 PM
[jn] Editor Decision	2024-06-04 01:11 PM
[jn] Editor Decision	2024-06-04 03:51 PM

Reviewer's Attachments Search

14476 in-review-assignment-3349-Article+Text-14416.docx	May 28,
---	---------

3349 / Jamaluddin et al. / Studi Komparasi Implementasi dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua

Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Copyediting Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Copyedited

[Search](#)

 14678	103-114 STUDI KOMPARASI (L).docx	June 4, 2024	Article Text
---	----------------------------------	--------------	--------------

STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA DAN PAPUA

Jamaluddin¹, M Najeri Al Syahrin²

¹Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat., Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat., Indonesia

*Korespondensi: Jamaluddin.fisip@ulm.ac.id

Citation (APA):

Email Autors:

Penulis 1, 2, 3, 4, Wajib di Isi

Submitted: Xxx x, 2023

Accepted: Xxx x, 2023

Published: Xxx x, 2023

Copyright © 2023 Authors

Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 National License.



ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah dengan mengambil kasus perbandingan/komparasi antara pulau Sumatera dan Papua. Metode penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dinilai tepat karena implementasi otonomi daerah bersifat multidimensi. Implementasi otonomi daerah di Sumatera dan Papua selama dua dekade terakhir masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan utamanya dalam mengurangi kemiskinan, dan menaikkan infrastruktur pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Tingkat keberhasilan implementasi otonomi daerah di wilayah Sumatera dari aspek daya saing daerah adalah 18,30% dan belum cukup berhasil meningkatkan daya saing daerah dari segi PDRB per kapita. Selain itu, penerapan otonomi daerah utamanya di daerah konflik tingkat konflik di Aceh menurun secara signifikan setelah otonomi daerah diberlakukan. Sementara tingkat konflik di Papua meningkat secara signifikan setelah otonomi daerah diberlakukan, dari rata-rata 100 korban tewas per tahun pada periode 1999-2005 menjadi rata-rata 300 korban tewas per tahun pada periode 2006-2018. Di Sumatera, khususnya di Aceh, otonomi daerah berhasil karena melibatkan partisipasi dan konsensus dari semua pihak yang terlibat, termasuk mantan pemberontak, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat. Di Papua, otonomi daerah gagal karena dilakukan secara sepihak dan otoriter oleh pemerintah pusat, tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat Papua.

Kata kunci: Komparasi, Implementasi, tantangan, otonomi daerah, desentralisasi.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the implementation of regional autonomy policy by taking the case of comparison between the islands of Sumatra and Papua. The research method uses the literature study method to collect various information relevant to the qualitative approach. This approach is considered appropriate because the implementation of regional autonomy is multidimensional. The implementation of regional autonomy in Sumatra and Papua over the past two decades has not been able to significantly improve welfare, especially in reducing poverty, and improving education, health and economic infrastructure. The success rate of implementing regional autonomy in the Sumatra region from the aspect of regional competitiveness is 18.30% and has not been successful enough to increase regional competitiveness in terms of GDP per capita. In addition, the implementation of regional autonomy mainly in conflict areas, the level of conflict in Aceh decreased significantly after regional autonomy was enacted. While the level of conflict in Papua increased significantly after regional autonomy was imposed, from an average of 100 deaths per year in the period 1999-2005 to an average of 300 victims killed per year in the period 2006-2018. In Sumatra, particularly in Aceh, regional autonomy is successful because it involves the participation and consensus of all parties involved, including former rebels, civil society, and the central government. In Papua, regional autonomy fails because it is carried out unilaterally and authoritatively by the central government, without regard for the interests and rights of the Papuan people.

Key words: Comparison, Implementation, challenges, regional autonomy, decentralization.

Commented [A1]: Tidak perlu ditulis keduanya dengan memekai tanda garis miring. Cukup tulis 1 saja, perbandingan..atau komparasi.

PENDAHULUAN

Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3. dst....

Kebijakan Otonomi Daerah dengan pemberian kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar bisa mengatur dan mengelola wilayah nya sendiri sudah tertulis di undang undang Republik Indonesia yaitu nomor 32 tahun 2014. Tujuan adanya otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dan sosial terutama kualitas Sumber Daya Alam dan Manusia, kegiatan pemerintah berjalan lebih efisien dan efektif terutama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat serta juga menjaga kestabilan politik dan menghindari perpecahan (Maulana et al, 2022).

Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan reformasi yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Namun, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, belum ada evaluasi komprehensif mengenai efektivitas otonomi daerah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah otonom baru yang terbentuk setelah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Aminah et al, 2021). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga ternyata belum memberikan kewenangan yang cukup bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Faktanya, sejumlah kasus yang menghambat pelaksanaan Otonomi daerah masih sering terjadi. Banyak faktor penyebabnya, termasuk Sistem pengawasan otonomi daerah yang ada saat ini. Komite Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD), misalnya, Mencatat peraturan pelaksanaan terkait sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, seperti keterlambatan Penyusunan APBD, kelalaian dalam program nasional, atau kelalaian bepergian ke luar negeri, masih belum tegas. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan juga dinilai masih lemah (Prabowo, 2020).

Konsep dan gagasan implementasi otonomi daerah telah diperdebatkan pada awal kemerdekaan Indonesia. Para tokoh politik Indonesia memperdebatkan bentuk negara yang akan digunakan, apakah federalisme atau kesatuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti konflik antar daerah, korupsi, dan separatisme yang belum terselesaikan. Beberapa masyarakat di provinsi seperti Aceh, Riau, (Sumatera) dan Papua, ingin memisahkan diri dari Indonesia karena mereka merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah pusat untuk waktu yang lama. Jika dilihat sebelum reformasi, pemerintah Indonesia hanya berfokus pada pulau Jawa sehingga terjadi kesenjangan sosial antar daerah. Sistem pemerintahan yang terpusat memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Namun hal ini hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pulau Jawa. Sementara masyarakat di luar pulau Jawa menjadi tidak berdaya. Kecemburuan terhadap kesenjangan sosial menyebabkan gejala disintegrasi bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga muncul wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal. Sebagai upaya untuk menangkal wacana tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan konsep otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rodiyah, et al, 2020).

Pada masa era Reformasi setelah tumbangnya Rezim orde baru, pemerintah Indonesia fokus menjaga keutuhan dan persatuan untuk mencegah separatisme salah satunya memberikan Hak Daerah Istimewa pada provinsi Aceh agar bisa menerapkan undang undang syariat islam dan politik sendiri dengan terbentuk nya partai partai lokal setelah bertahun bertahun ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) oleh orde baru. Selain itu pemerintah juga memberikan status Daerah Otonomi khusus di Papua dengan segala kemudahan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah pusat juga

Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3. dst....

Commented [A2]: n nya huruf besar...Nomor, karena ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan

Commented [A3]: t nya huruf besar, karena berkenaan dengan perundang-undangan

Commented [A4]: Secara konseptual dan empirik, tidak dikenal terminologi..kebijakan reformasi..Dapat diganti kalimat/frasanya menjadi.....salah satu kebijakan negara yang terbit seiring dengan semangat reformasi...dst..

Commented [A5]: Ini bukan Undang-Undang, tapi Peraturan Pemerintah (PP). Karena UU nomor 12 Tahun 2017 adalah tentang perdagangan manusia 9Human trafficking), bukan tentang pembinaan...dst.

Commented [A6R5]:

Commented [A7]: Pemantauan..bukan Pengawasan

Commented [A8]: Hal ini muncul bukan pada masa pra kemerdekaan (yang diperdebatkan dalam sidang2 BPUPKI dan PPKI) dan awal kemerdekaan, tetapi pada era setelah tahun 50 - an

bahwa isi otonomi daerah kurang penting daripada proses pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Kekuasaan yang diberikan kepada Aceh dan Papua serupa, meskipun cara otonomi daerah dinegosiasikan dan siapa yang diberdayakan bervariasi. Pada awalnya di Aceh dan di Papua, otonomi daerah terkesan dipaksakan, dan cenderung menyisihkan para pemberontak. Otonomi daerah Aceh yang akhirnya berhasil dinegosiasikan kemudian pada akhirnya mampu melibatkan mantan pemberontak (GAM) untuk ikut berpartisipasi mengambil kendali pemerintahan secara mandiri dibawah kendali pemerintah pusat (Barter & Wangge, 2022).

Ditekankan bahwa otonomi daerah merupakan langkah yang tepat untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah negara yang luas seperti Indonesia. Namun, terdapat peringatan penting bahwa kadang-kadang pemekaran wilayah juga bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kegagalan atau ketidakefektifan dari pemekaran tersebut. Referensi terkait evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memberikan data penting tentang angka keberhasilan pemekaran wilayah. Di antara penyebab kegagalan tersebut adalah dominasi peran legislatif dalam usulan pemekaran, termasuk kendala-kendala yang muncul dalam proses tersebut. Kapasitas fiskal yang sempit di pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah kelembagaan serta infrastruktur merupakan hal yang disoroti dengan baik. Penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti moratorium pemekaran daerah dan pengaturan melalui PP RI No. 78 Tahun 2007, serta implementasi Grand Design Penataan Daerah (Desartada) memberikan perspektif yang jelas tentang usaha yang dilakukan untuk mengelola masalah ini. Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) memberikan gambaran yang kuat tentang upaya pemerintah untuk memberikan arah dan pedoman yang komprehensif dalam pembentukan daerah otonom baru (Nashrullah & Lohalo, 2022).

Selama ini pembangunan dan tingkat kesejahteraan akibat dari pemberlakuan otonomi khusus di Papua masih belum terlalu signifikan. Proses pembangunan infrastruktur tidak serta merta berdampak signifikan bagi kesejahteraan di Papua karena angka kemiskinan khususnya di kawasan rural Papua masih tinggi, serta masih rendahnya tingkat pendidikan dan pembangunan kesehatan yang menjadi pelayanan dasar di Papua (Resosudarmo et al., 2014). Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa otonomi khusus tidak berdampak dan menyentuh masalah fundamental di Papua. Sektor pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi kuat dengan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dalam suatu daerah.

Dalam perbandingannya dengan kondisi implementasi otonomi daerah di Aceh dan Bengkulu (Sumatera) juga kurang lebih sama. Aceh dan Bengkulu menjadi salah satu wilayah pioneer kemiskinan teratas di Pulau Sumatera dan masuk dalam sepuluh besar di Indonesia. Padahal Aceh didukung besarnya anggaran dari APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), dana otonomi khusus, serta dana bagi hasil minyak dan gas tidak mampu diimbangi dengan pengelolaan dana otonomi yang maksimal oleh pemerintah daerah Aceh (Dewi & Nurzalikha, 2018).

Infrastruktur pembangunan daerah akan terlihat baik jika memiliki skor Infrastructure Development Index (IDI) yang tinggi dan mencapai lebih dari lebih dari 0,597 ($IDI > 0.597$) dan sebaliknya pembangunan setiap daerah akan rendah jika kurang dari 0,597 ($IDI < 0.597$) (Fahmi & Purnamadewi, 2020). Pada data di atas, terlihat disparitas IDI di Aceh masih cukup tajam. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Papua

Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3. dst....

Commented [A15]: Data keberhasilannya, yang mana?

Commented [A16]: Sertakan data kuantitatifnya tentang hal ini.

Commented [A17]: Sertakan/tuliskan data kuantitatif tentang hal ini.

Commented [A18]: Agar didukung dengan data kuantitatif.

Commented [A19]: Penulisannya, dobel

Commented [A20]: Agar didukung dengan data kuantitatif.

yang bahkan jauh lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan Aceh. Tingkat kemiskinan di Papua lebih tinggi serta lebih massif. Tidak pelak, bila kemiskinan menjadi pemantik gejolak keamanan di Papua (Kambu, 2019). Apabila dibanding Aceh maka Papua di samping menerima fiskal otonomi khusus yang lebih besar juga mendapatkan DBH SDA (dana bagi hasil sumber daya alam) yang harusnya juga lebih besar daripada provinsi lain di Indonesia (Setiawan et al, 2022). Bentuk pendistorsian otonomi khusus di Aceh dan Papua ternyata belum mampu merespon masalah kesejahteraan. Indeks pembangunan infrastruktur juga masih menampilkan tajamnya disparitas yang terjadi, yang pada akhirnya ketidakmerataan menjadi salah satu hambatan peningkatan kesejahteraan. Kebijakan otonomi khusus adalah satunya dengan adanya transfer fiskal dari pusat ke daerah juga tidak mampu diimbangi dengan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan kewenangan otonomi khusus tersebut (Sukarniati et al., 2004).

Tantangan Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua

Beberapa tantangan problematika implementasi otonomi daerah yang secara umum dihadapi di Sumatera dan Papua adalah ketidaksiapan SDM daerah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni memperkuat fungsi kontrol serta memaksimalkan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kekuatan penyeimbang di daerah. Selain itu, perlu juga menekankan pengawasan dan pengendalian baik formal maupun informal untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien (Engkus et al, 2019). Selain itu, terdapat masalah lain seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya pengawasan terhadap aparat pengawasan intern pemerintah, dan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Masalah-masalah ini perlu diatasi agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dampak positif dari otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah dalam pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat, serta membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi di antara pemerintah daerah. Namun, dampak negatifnya adalah rendahnya kualitas pelayanan publik karena adanya pelimpahan kewenangan yang sering disalah artikan atau disalah gunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang memadai dan formal baik secara formal maupun informal serta sinergitas antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat (Engkus et al, 2019).

Masalah kedua yang dihadapi oleh hampir beberapa daerah utamanya di Sumatera adalah masalah praktik dinasti politik tipe regenerasi yang dapat menghambat kemandirian daerah dan meningkatkan kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Praktik dinasti politik ini dapat menghambat perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan daerah, serta memperkuat dominasi elit lokal baik secara ekonomi maupun politik di daerah. Selain itu, praktik dinasti politik juga dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi praktik dinasti politik dan meningkatkan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Guritno et al, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi praktik dinasti politik, namun juga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di daerah regenerasi dinasti politik. Meskipun dinasti politik mampu menurunkan persentase kemiskinan secara stabil, distribusi pendapatan di mayoritas daerah dinasti politik (daerah miskin) tidak merata. Data

Commented [A21]: Agar didukung dengan data kuantitatif.

Commented [A22]: Agat didikung dengan data komparatif, untuk kemudian muncul data selisihnya. Bisa dalam prosentase.

Commented [A23]: Dukung dengan data.

Commented [A24]: Uraikan, kongkritnya seperti apa, dan dukung dengan data.

Commented [A25]:

Commented [A26]: Ini, masalah? Atau tantangan? Kan bagian ini membahas tentang..tantangan.

Commented [A27]: Kalimat ini merupakan saran/rekomendasi. Jangan muncul dalam pembahasan.

Commented [A28]: Tantangan?

Commented [A29]: Dukung dengan data tentang dinasti politik di 71 DOB Sumatera dan Papua, sebagai tantangan implementasi kebijakan otda.

Commented [A30]: Kalimat ini menunjukkan saran/rekomendasi, bukan..pembahasan.

Commented [A31]: Dukung dengan data yang kongkrit.